KOMPAS, SABTU, 28 FEBRUARI 2015

TANAH KAS DESA

Kasultanan Tetap Pemilik

YOGYAKARTA, KOMPAS — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menerbitkan peraturan yang menyatakan tanah kas desa di provinsi itu tetap merupakan milik Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Peraturan itu juga menetapkan, tanah kas desa yang sudah disertifikasi atas nama pemerintah desa harus dialihkan menjadi milik kasultanan dan kadipaten.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, tanah desa di DIY didefinisikan sebagai tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Pemerintah desa hanya memiliki hak *anggaduh* atau hak memanfaatkan tanah yang diberikan kasultanan dan kadipaten.

Ketentuan itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan desa-desa di Indonesia bisa mendapatkan hak milik atas tanah. Pasal 76 UU Desa menyatakan, kekayaan desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

"Namun, ketentuan UU Desa itu memang tidak bisa diberlakukan secara penuh di DIY, karena ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Jadi tidak masalah jika tanah kas desa di DIY tidak menjadi milik pemerintah desa," kata mantan anggota Tim Asistensi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY, Achiel Suyanto, Jumat (27/2), di Yogyakarta.

UU Keistimewaan DIY menyatakan, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, dua institusi kerajaan di DIY, merupakan badan hukum yang memiliki hak atas tanah. Tanah milik Kasultanan Yogyakarta kerap disebut Sultan Ground, sementara tanah milik Kadipaten Pakualaman disebut Paku Alam Ground.

Berdasarkan Pergub DIY Nomor 112 Tahun 2014, tanah-tanah kas desa di DIY tergolong sebagai Sultan Ground dan Paku Alam Ground. Karena itu, tanah-tanah tersebut tak bisa disertifikasi atas nama pemerintah desa seperti yang berlaku di provinsi lain. Bahkan, Pasal 19 pergub itu menyatakan, tanah desa yang telah disertifikasi atas nama pemerintah desa harus dialihkan menjadi milik kasultanan dan kadipaten.

Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Bayu Dardias, mengatakan, ketentuan soal tanah bengkok dan pengalihan-areman dalam pergub berbeda dengan UU Desa. (HRS)